



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 10 Telanaiपुरা Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi telah dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah (LPPD) Tahun 2025 ini dibuat dalam rangka memberikan gambaran dan informasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah, Perlindungan Masyarakat serta Pengendalian Kebakaran.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Kami menyadari bahwa apa yang kami laksanakan ini belum sepenuhnya sempurna, baik dari segi materi maupun dari segi penyajiannya, oleh karena itu sangat mengharapkan kritik dan saran bagi perbaikan dimasa mendatang.

Demikian, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kami dan semua pihak.

Jambi, Januari 2026

KEPALA SATUAN,



RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 19661229 198512 1 001

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Kelembagaan	2
D. Maksud dan Tujuan	6
BAB II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	7
A. Visi dan Misi Provinsi Jambi	7
B. Indikator Kinerja Utama	9
BAB III Kebijakan Umum	11
I. Urusan Desentralisasi	11
II. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan	11
A. Program dan Kegiatan Prioritas	11
B. Program dan Kegiatan Pendukung	12
C. Tingkat Standar Pelayanan Minimal	14
D. Satuan Kerja Perangkat Daerah Urusan Wajib	24
E. Sumber Daya Aparatur	24
F. Sarana dan Prasarana	25
G. Alokasi dan Realisasi Anggaran	26
H. Proses Perencanaan Pembangunan	27
I. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan	27
BAB IV Permasalahan dan Pemecahan Masalah	28
I. Permasalahan	28
II. Upaya Pemecahan Masalah	28
BAB V Penutup	31
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Laporan yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan wajib pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum dimaksudkan untuk bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi Tahun 2025.

Materi laporan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Polisi Pamong Praja.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Linmas.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

C. Kelembagaan

Kelembagaan Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pengendalian kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Satpol PP dan Damkar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengendalian kebakaran;
2. Penyusunan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
3. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
4. Penyusunan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Penyusunan kebijakan pengendalian dan pemetaan kebakaran;
6. Penyusunan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penanggulangan kebakaran dengan kepolisian Negara republic Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, instansi terkait dan / atau aparatur lainnya;
7. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan perda dan peraturan kepala daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi

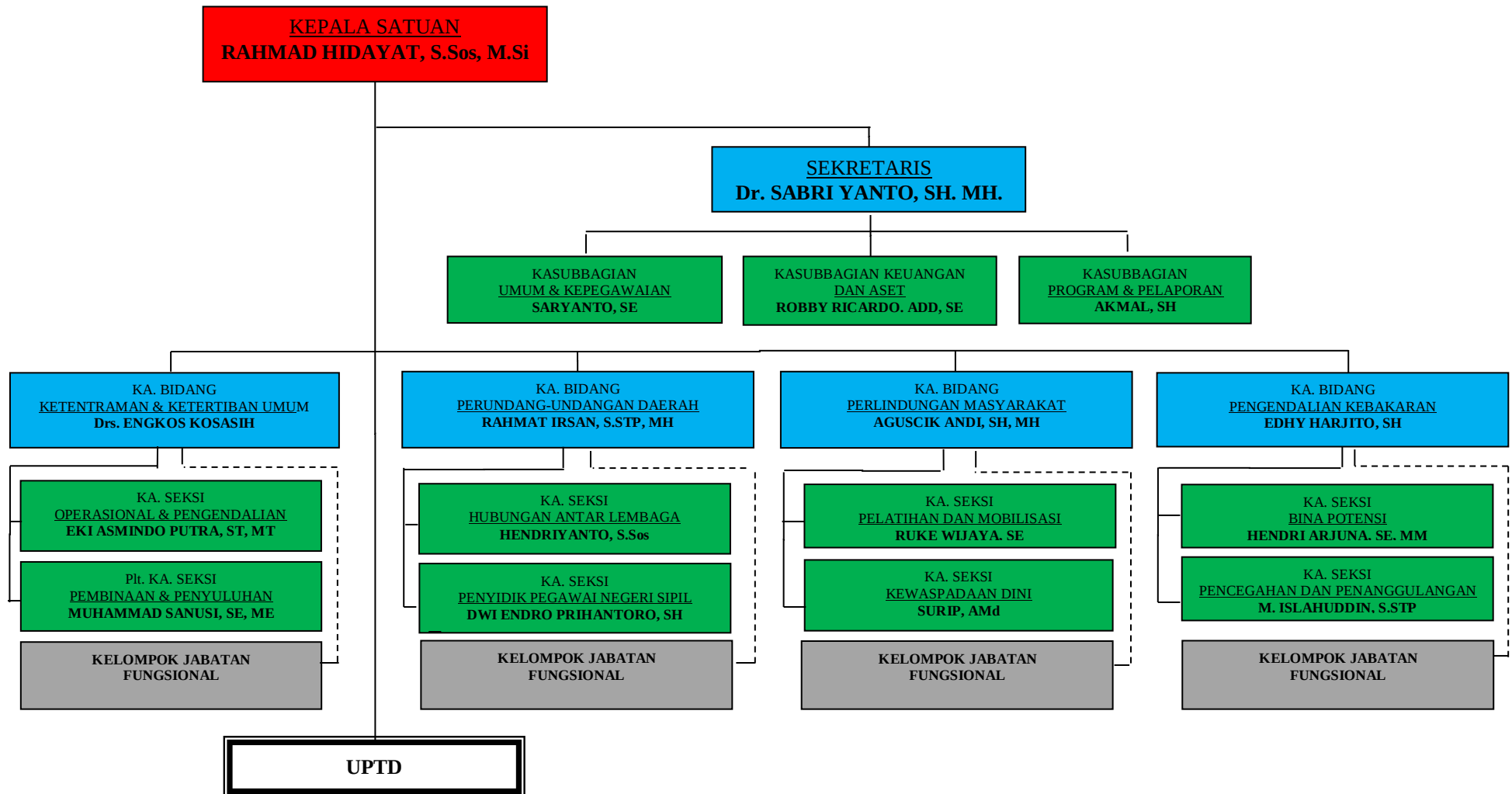
Jambi merupakan Esselonering II a dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari:
 - 1) Seksi Operasiondaal dan Pengendalian
 - 2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
 - 3) Jafung Muda / Sub Koordinator Ketertiban Umum
- d. Bidang Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari:
 - 1) Seksi Hubungan Antar Lembaga
 - 2) Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - 3) Jafung Muda / Sub Koordinator Penegakan PUD

- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi
 - 2) Seksi Kewaspadaan Dini
 - 3) Jafung Muda / Sub Koordinator Data dan Informasi
- f. Bidang Pengendalian Kebakaran, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan
 - 2) Seksi Bina Potensi
 - 3) Jafung Muda / Sub Koordinator Pemetaan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelembagaan Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi. Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar I
STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI



D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini adalah dalam rangka memberikan gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban, Penegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah, dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran selama tahun 2025.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah, dan Perlindungan Masyarakat serta Pengendalian Pemadam Kebakaran selama Tahun 2025 dan merupakan bahan LPPD Provinsi Jambi Tahun 2025.

BAB II

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

A. Visi dan Misi Provinsi Jambi.

Berdasarkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam RPJMD adalah ***“Mewujudkan JAMBI MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di Bawah Ridho ALLAH SWT”***.

Sedangkan Misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
3. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga

berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Pada RPJMD Provinsi Jambi 2025 – 2029, tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun adalah :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis.
2. Meningkatnya daya saing daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah.
3. Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara social.
4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berkesetaraan gender.

Selanjutnya berdasarkan Visi, Misi dan tujuan RPJMD 2025 – 2029, dirumuskan Tujuan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan tujuan strategis harus dimungkinkan untuk dapat diukur tingkat perkembangan pencapaiannya. Oleh karena itu tujuan strategis harus memiliki indikator kinerja sebagai bahan pengukuran tingkat capaian program dan kegiatan.

Tujuan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi merujuk kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun

2025-2029 adalah *Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum kehidupan bermasyarakat* dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Tujuan tersebut selaras dengan misi keempat Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yaitu Memantapkan ketenteraman dan ketertiban umum, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah dan merupakan bagian dari pelaksanaan untuk mewujudkan Misi dan Tujuan RPJMD dalam Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Perumusan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi mengacu kepada sasaran RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 terutama yang memiliki keterkaitan langsung dalam pencapaiannya. Dari 11 (sebelas) Sasaran RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029, maka yang terkait langsung adalah sasaran kesatu, yaitu Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital. Oleh sebab itu maka Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah Meningkatnya stabilitas ketertiban umum, ketenteraman masyarakat (Tibumtranmas) dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah, dengan indikator :

- 1. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU);**
- 2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas (IPM); dan;**
- 3. Indeks Penyelenggaraan Kebakaran (IPK).**

BAB III

KEBIJAKAN UMUM

I. URUSAN DISENTRALISASI

II. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

A. Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Prioritas

Program dan kegiatan serta Sub kegiatan yang menjadi prioritas urusan wajib yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan Sub kegiatan :

- 1) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat
- 2) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.
- 3) Penindakan atas gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan kerusakan masa.

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, dengan Subkegiatan :

- 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dengan Subkegiatan :

- 1) Kerjasama antar Lembaga Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, dengan Subkegiatan :

- 1) Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran.
- 2) Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan.

B. Program dan kegiatan Pendukung (Rutinitas).

Program dan kegiatan yang menjadi rutinitas untuk mendukung urusan wajib yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan Kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Subkegiatan adalah :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Subkegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian, dengan Subkegiatan :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah, dengan Subkegiatan :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan.
 - 4) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan Sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik.
 - 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**, dengan Subkegiatan :
- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan.
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya.

C. Tingkat Standar Pelayanan Minimal

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah memiliki peraturan yang mengatur Standar Pelayanan Minimal yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ditindaklanjuti oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kab/Kota.

1. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai sasaran meningkatnya Stabilitas Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan 3 (tiga) Indikator Sasaran antara lain :

- a. Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- b. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat.
- c. Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan.

Indikator persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dicapai melalui Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jambi, melalui :

- A. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.
- B. Penindakan atas ketenteraman dan ketertiban umum Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui: Penertiban, Pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa dilaksanakan dengan indikator persentase penurunan demo tanpa kerusuhan (anarkis). Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 100 %.

Capaian Indikator Kinerja Program pada Tahun 2021 yaitu 100 % (61 kali aksi demonstrasi dengan berlangsung damai tanpa anarkis), capaian indikator pada tahun 2022 yaitu aksi demonstrasi sebanyak 78 kali berlangsung damai tanpa anarkis, dengan persentase capaian 100 % dari Target 100 %. Pada Tahun 2023 yaitu sebanyak 56 kali dengan Persentase 100%, sedangkan gangguan trantibum pada Tahun 2024 ini sebanyak 58 kali dengan Persentase 100% selanjutnya pada tahun ini 2025 sebanyak 59 kali dengan rincian 52 kali unjuk rasa (terdapat 1 anarkis) dan 7 kali pengaduan dengan Persentase 100 %.

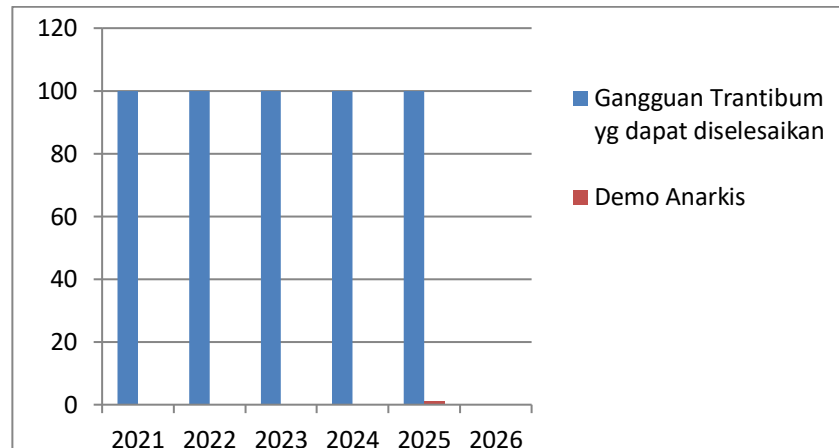
Dengan demikian capaian kinerja Tahun 2021, Tahun 2022 serta Tahun 2023 dan Tahun 2024 serta Tahun 2025 adalah sebesar 100 %.

Gambaran persentase unjuk rasa / demonstrasi dari tahun 2021-2026 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 1
Capaian Penanganan Pengaduan Gangguan Trantibum
Yang dapat diselesaikan Tahun 2021 - 2026

NO	URAIAN	CAPAIAN INDIKATOR PENANGANAN DEMO TANPA ANARKIS					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-
2	Aksi Demo anarkhis	0	0	0	0	1	-

Grafik 1
Capaian Penanganan Pengaduan Gangguan Trantibum
Tahun 2016 – 2021



C. Pengamanan, Pengawasan dan Patroli Wilayah serta Deteksi Dini.

Kegiatan pengamanan, pengawasan dan patroli wilayah serta deteksi dini dilaksanakan dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan di Daerah. Pengamanan dan Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan Kepala Daerah dan Pejabat penting lainnya. Sedangkan Patroli Wilayah dilakukan untuk melaksanakan pengawasan terhadap asset vital milik pemerintah Provinsi Jambi baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar daerah. Sedangkan Deteksi dini dilaksanakan untuk memantau perkembangan atau menciptakan suasana yang aman dan kondusif dilingkungan masyarakat. Gambaran pelaksanaan kegiatan tersebut selama tahun 2025 dapat terlihat sebagaimana tertera dalam data dan grafik sbb :

Data Pengamanan, Patroli Wilayah, Pengamanan dan Pengawasan
Unjuk Rasa Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Pengamanan	175	Laporan
2	Patroli Wilayah	242	Laporan
3	Unjuk Rasa	52	Laporan
4	Pengawasan	79	Laporan
5	Pengaduan Masyarakat	7	Pengaduan

D. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Indikator Cakupan Petugas Satlinmas dicapai melalui Upaya penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dengan target minimal satu RT satu orang petugas satlinmas atau minimal satu desa / kelurahan sepuluh orang, Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan adalah cakupan petugas perlindungan masyarakat. Cakupan petugas Satlinmas Tahun 2021 yaitu 13.109 dari target 15.620 (83,92), Capaian Cakupan petugas Satlinmas tahun 2022 tidak mengalami perubahan yaitu 13.109 dari target 17.150 atau mengalami penurunan capain kinerja menjadi 76.43 %. Dari 13.109 orang anggota Satlinmas terdapat 5.776 orang yang sudah dikukuhkan. Sedangkan pada Tahun 2023 jumlah anggota Satlinmas berjumlah 14.643 orang, pada tahun 2024 dan tahun 2025 tetap 14.643 orang dengan 7.942 orang yang telah dikukuhkan.

Penurunan capaian kinerja cakupan petugas satlinmas disebabkan oleh kurang optimalisasi pembentukan satlinmas di

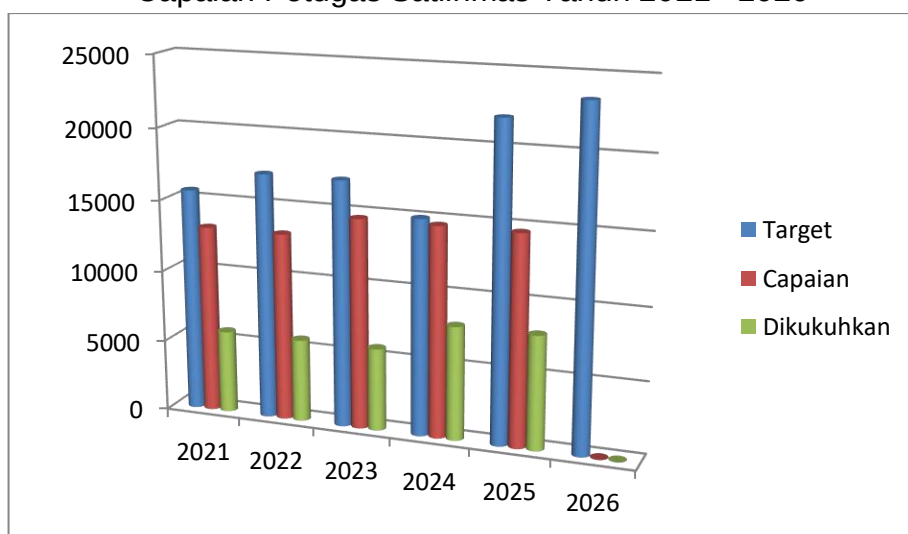
kabupaten/kota dari target tahun ini sebesar 15.000 serta terkendalanya permasalahan keterbatasan anggaran desa diantaranya untuk pembayaran honorarium anggota Satlinmas di desa-desa.

Cakupan petugas Satlinmas dari tahun 2021-2026 dapat lihat sebagaimana tergambar pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3
Capaian Petugas Satlinmas Tahun 2021 – 2026

NO	CAKUPAN PETUGAS SATLINMAS			
	TAHUN	TARGET	CAPAIAN	DIKUKUHKAN
1.	2021	15.620	13.109	5.776
2.	2022	17.150	13.109	5.776
3.	2023	17.150	14.643	5.776
4.	2024	15.000	14.643	7.942
5.	2025	22.000	14.643	7.942
6.	2026	23.430	-	-

Grafik 4
Capaian Petugas Satlinmas Tahun 2021– 2026



E. Penindakan atas ketenteraman dan ketertiban umum Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui:

Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur terdapat dalam Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Indikator Kinerja Persentase Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan adalah :

- a. Persentase peningkatan PPNS untuk penegakan perda sektoral Provinsi Jambi. Capaian tiap tahun menunjukkan angka penurunan walaupun ada pembentukan PPNS baru namun jumlahnya tidak sebanding dengan PPNS yang mengalami mutasi atau yang memasuki usia pensiun. Kondisi awal jumlah PPNS sektoral Provinsi Jambi tahun 2015 adalah 121 orang mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 119 orang, tahun 2017 sebanyak 112 orang, Tahun 2018 berjumlah 91 orang, Tahun 2019 jumlah PPNS hanya 91 orang, Tahun 2020 berjumlah 83 orang, Tahun 2021 berjumlah 78 orang, Tahun 2022 mengalami penurunan yaitu berjumlah 73 Orang. dan terakhir pada Tahun 2023 berjumlah 73 Orang.
- b. Persentase Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, dengan 2 subkegiatan yaitu (1) sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub dengan anggaran Rp. 40.708.600,- dengan Realisasi Rp. 40.367.371,- atau 99.16 %, dan (2) Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dengan anggaran

40.159.500,- dengan realisasi Rp. 40.010.500,- atau 99.64%.

dengan capaian Indikator Kinerja 100 persen, sebagai berikut :

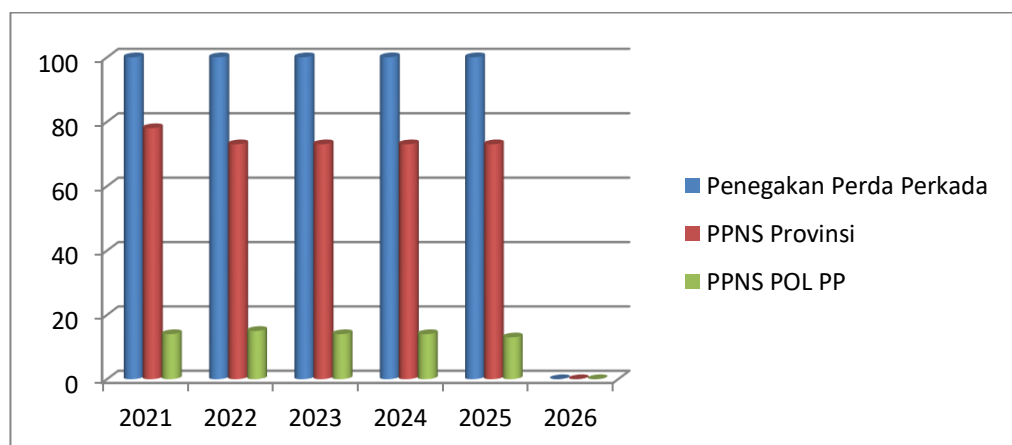
- Kegiatan Pengawasan, Non Yustisi, Koordinasi, Sosialisasi dan Pembinaan sebanyak 100 (seratus) kali kegiatan dengan jumlah pelanggaran 197 pelanggaran.

Berdasarkan rincian data penegakan Perda dan Perkada diatas maka, Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak / ditangani yaitu 100 %.

Tabel 3
Capaian Penegakan Perda dan Kebijakan Daerah Lainnya
Tahun 2021 – 2026

NO	URAIAN	CAPAIAN INDIKATOR PENEGAKAN PERDA					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	100 %	100%	100%	-
2	Jumlah PPNS Lingkup Provinsi	78 Org	73 Org	73 Org	73 Org	73 Org	-
3	Jumlah PPNS Pol PP Provinsi	14 Org	15 Org	14 Org	14 Org	13 Org	-

Grafik 3
Capaian Penegakan Perda dan Kebijakan Daerah Lainnya
Tahun 2021 – 2026



2. Penyelenggaraan Pengendalian Bencana Kebakaran.

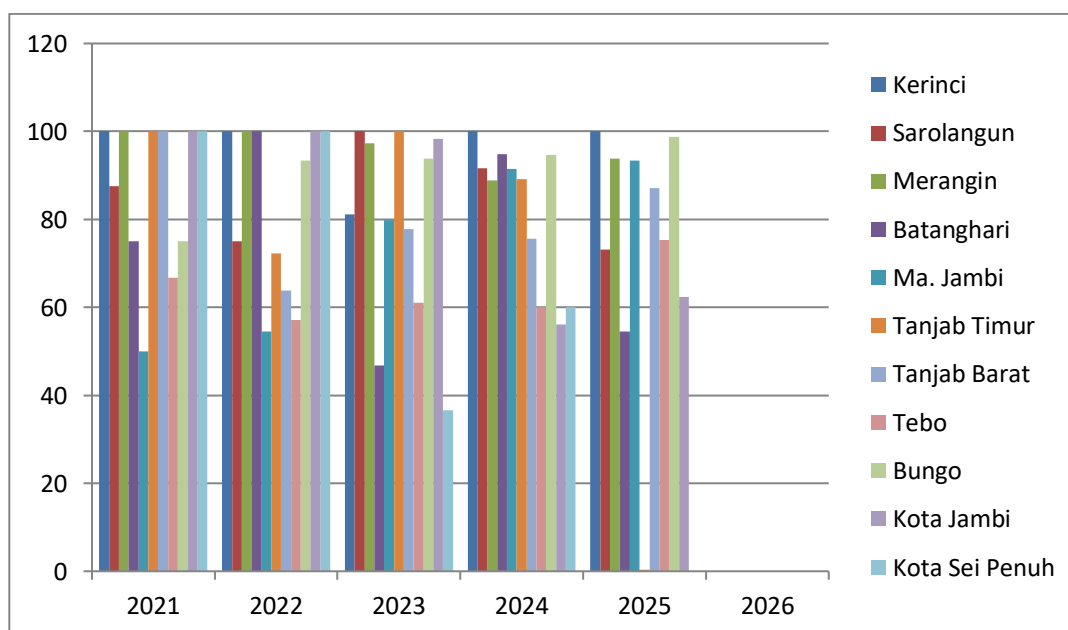
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran pada tahun 2025 terdiri dari 1 kegiatan, yaitu kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dengan 2 Sub kegiatan terdiri dari (1) Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. (2) Penyajian data kejadian dan dampak Kebakaran serta Penyelamatan.

Indikator Kinerja Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran adalah pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Capaian indikator pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) daerah layanan WMK pada tahun 2025 sebesar 69.68 % sedikit mengalami penurunan dari tahun 2024 yaitu sebesar 76.76 %, dan tahun 2023 yaitu 82.18 % serta tahun 2022 yaitu 82.55 %. Dari 11 kabupaten/kota yang melaporkan (Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Muaro Jambi, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tanjab Barat, Tanjab Timur, Kerinci, Tebo dan Batanghari). Sebagaimana tergambar pada tabel dan grafil berikut ini :

Tabel 4
Capaian Wilayah Manajemen Kebakaran Tahun 2021 – 2026

No	Kab/Kota	Indikator Wilayah Manajemen Kebakaran					
		2021 %	2022 %	2023 %	2024 %	2025 %	2026 %
1.	Kerinci	100	100	81.08	100	100	-
2.	Sarolangun	87.5	75	100	91.67	73.07	-
3.	Merangin	100	100	97.29	88.89	93.75	-
4.	Batanghari	75	100	46.78	94.83	54.54	-
5.	Muaro Jambi	50	54.54	98.26	91.43	93.33	-
6.	Tanjab Timur	100	72.22	100	89.19	0.32	-
7.	Tanjab Barat	100	63.88	77.78	75.61	87.09	-
8.	Tebo	66.67	57.14	61.03	60.00	75.26	-
9.	Bungo	75	93.33	93.75	94.64	98.78	-
10.	Kota Jambi	100	100	98.26	56.16	62.32	-
11.	Sei Penuh	100	100	36.58	60.00	0	-

Grafik 5
Capaian Wilayah Manajemen Kebakaran Tahun 2016 – 2021



D. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Provinsi Jambi.

E. Sumber Daya Aparatur (Data Kepegawaian)

1. Jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar : 283 Orang

Status - Pegawai Negeri Sipil : 154 Orang
PPNS 11 Orang
- Pegawai Tidak Tetap : 129 Orang

2. Rincian PNS Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi

a. Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah
1.	Esselonering II a	1
2.	Esselonering III a	5
3.	Esselonering IV a	10
4.	Fungsional Pol PP	104
5.	Fungsional Umum	34
Jumlah		154

Sumber : Satpol PP Prov. Jambi, 2025.

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	2
2	SLTP	-
3	SLTA	60
4	D3	3
5	S1	83
6	S2	6
Jumlah		154

Sumber : Satpol PP Prov. Jambi, 2025.

c. Berdasarkan Kepangkatan / Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I	1
2	II	54
3	III	89
4	IV	10
Jumlah		154

Sumber : Satpol PP Prov. Jambi, 2025.

d. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - Laki	144
2	Perempuan	10
Jumlah		154

Sumber : Satpol PP Prov. Jambi, 2025.

F. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yang pada awalnya beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 10 Telanaipura, selanjutnya terhitung pada tanggal 7 Juli 2025 berpindah ke Gedung Kajang Lako Eks Arena MTQ Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Kode Pos 36139, dengan memiliki fasilitas sebagaimana berikut :

Tabel 5
Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
I	Gedung 1. Gedung kantor 1 lantai Gedung Kajang Lako Eks Arena MTQ	1 unit	Baik
II	Alat angkutan 1. Kendaraan dinas roda 6 2. Kendaraan dinas roda 4 3. Kendaraan dinas roda 2 4. Sepeda	2 unit 16 unit 22 unit 12 Unit	1 Baik dan 1 Rusak 19 baik dan 3 Baik 19 baik dan 3 rusak 8 Baik dan 4 Rusak

No	Uraian	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
III	Peralatan kantor 1. Komputer 2. Laptop 3. Proyektor / Infocus 4. Printer	17 unit 8 unit 1 unit 15 unit	Baik 5 Baik dan 3 Rusak Baik Baik
IV	Perlengkapan dinas 1. Revolver 2. Senjata bahu 3. Gas Air Mata / Stik gas 4. Souftgun	6 pucuk 4 pucuk 5 buah 10 buah	Dititipkan di POLDA Jambi
V	Alat keamanan lain-lain 1. Pentungan 2. PHH 3. Tenda	30 Buah 30 Buah 2 Buah	Baik Baik Baik

Sumber : Satpol PP Prov. Jambi, 2025.

G. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 27.348.570.176,- (*dua puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*) terealisasi sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp. 26.390.853.468,- (*dua puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*) atau 96,50 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Program	Realisasi s/d 31 Desember 2024 (dalam Rupiah)				
		Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1.	Sekretariat	23.241.677.901	22.304.179.897	95,97	937.498.022	4,03
2.	Trantibum	3.901.056.075	3.890.450.500	99,73	10.605.575	0,27
3.	PPUD	80.868.100	80.381.092	99,40	486.229	0,60
4.	Linmas	50.840.900	50.158.092	98,66	682.808	1,34
5.	Damkar	74.127.200	65.683.126	88,61	8.444.074	11,39
Total		27.348.570.176	26.390.853.468	96,50	957.716.708	3,50

Sumber : Satpol PP Prov. Jambi, 2025

H. Proses Perencanaan Pembangunan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025, disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja (Renja) OPD dan sesuai dengan mekanisme perencanaan melalui proses panitia anggaran.

I. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (Lengkap, Kurang, Mencukupi dan lainnya).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi yaitu Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Perda dan Perkada, Perlindungan Masyarakat dan Pengendalian Kebakaran Sarana yang digunakan pada saat ini masih kurang memadai terutama sarana operasional dalam pelaksanaan tugas di lapangan seperti penegakan Peraturan daerah dan Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

I. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 terkait pencapaian IKK dan upaya yang perlu diambil agar target IKK dapat terealisasi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi terkait pencapaian IKK antara lain adalah :

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi antara lain :

- Frekwensi gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya, baik daerah maupun nasional.
- Terlambatnya penerimaan aspirasi dari masyarakat pendemo oleh pejabat yang berwenang, sehingga menimbulkan gejolak yang mengarah kepada tindakan yang berujung anarkhis.
- Masih kurangnya kecukupan petugas satuan perlindungan masyarakat di daerah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan serta dalam membantu penanganan bencana.
- Rendahnya minat masyarakat menjadi petugas perlindungan masyarakat di daerah.
- Belum adanya alokasi dana khusus untuk pemberdayaan petugas perlindungan masyarakat.

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur antara lain :

- Belum optimalnya penegakan peraturan daerah yang disebabkan oleh tidak lengkapnya peraturan pelaksana (juklak) pendukungnya baik berupa Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur serta sarana pendukung lainnya.

c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi antara lain :

- Belum optimalnya kinerja aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- Belum mampunya aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan Penyidikan dan Penyelidikan atas pelanggaran Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.

d. Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran antara lain :

- Masih tingginya angka kejadian kebakaran akibat rendahnya kesadaran masyarakat dan badan hukum terhadap bahaya kebakaran.
- Kondisi daerah Provinsi Jambi yang rawan kebakaran.
- Masih terbatasnya cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten / kota.
- Belum terpenuhinya wilayah manajemen kebakaran di Kabupaten/Kota.

II. Upaya Pemecahan Masalah

Upaya yang diambil agar target IKK Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 dapat terealisasi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- b. Peningkatan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah serta koordinasi dengan dinas-dinas pengampu perda dalam upaya efektifitas penegakan perda.
- c. Mendorong pemerintah kabupaten / kota dalam memenuhi kecukupan petugas perlindungan masyarakat melalui pembentukan petugas linmas di daerahnya masing – masing.
- d. Pemberdayaan petugas satlinmas di daerah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan, membantu dalam penanggulangan bencana serta pengamanan TPS saat pemilu dan pilkada melalui peningkatan kapasitas linmas.
- e. Pemetaan daerah rawan kebakaran.
- f. Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran di Kabupaten / Kota.
- g. Mendorong peningkatan pelayanan bencana kebakaran kabupaten / kota melalui sosialisasi dan penyuluhan.

BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Jambi pada Tahun 2025 dikategorikan sudah cukup berhasil, hal ini dapat dilihat selama tahun tersebut tidak terjadi gejolak dalam masyarakat, situasi tetap kondusif. Termasuk pada pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi sebagai upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan Pengendalian Kebakaran yang telah diprogramkan semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai program, tidak terdapat kendala yang berarti.

Demikian laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi selama Tahun 2025 ini disampaikan, semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan laporan seperlunya.

Jambi, Januari 2026


KEPALA SATUAN,
RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19661229 198512 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Gedung Kajang Lako Eks. Arena MTQ
RT. 01 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Kode Pos 36139

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

NO	ASPEK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	5	6	8	9
1	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (Pengaduan dan Unjuk Rasa)	$\frac{\text{Jlh Pengaduan dan Unjuk rasa yg diselesaikan}}{\text{Jlh Pengaduan dan Unjuk rasa yg masuk}} \times 100\%$ $\frac{59}{59} \times 100 \%$	100 %	Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi.

Sumber : Bidang Trantibum Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi

Jambi, Januari 2026
KEPALA SATUAN,

RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Madya
Np. 19861229 198512 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Gedung Kajang Lako Eks. Arena MTQ
RT. 01 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Kode Pos 36139

DATA JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DISELESAIKAN TAHUN 2025

No	Tanggal pengaduan	Jenis pengaduan	Lokasi	Jumlah pelanggar / kasus	Keterangan	Status pengaduan
1.	03/01/2025	Penertiban Pedagang Kaki Lima di Depan RSUD Raden Mattaher Jambi	RSUD Raden Mattaher Jambi	8 PKL	Pelanggar yang ditemui Petugas dsan Pengaduan RSUD Raden Mattaher Jambi	Selesai
	03/01/2025	Pedagang Kaki Lima Kopi Keliling	Kota Jambi/ Jl. Jend. A. Yani Telanaipura	10 PKL	Pelanggar yang ditemui Petugas	Selesai
2.	3/02/2025	Penertiban Siswa berada diluar lingkungan sekolah pada jam belajar	Kota Jambi	25 Siswa	Pengaduan Sekolah dan Pelanggar yang ditemui Petugas	Selesai
3.	07/02/2025	Parkir Liar di depan RSUD Raden Mattaher Jambi	RSUD Raden Mattaher Jambi	25 Siswa	Pengaduan Pengelola Parkir CV. Putra Bersaudara nomor Surat 062/JBI/CV/PB/XII/2024	Selesai
4.	05/02/2025	Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Frostage Ruas Jalan Tol Betung - Tempino	Jalan Frostage Ruas Jalan Tol Betung - Tempino	1 Lokasi	Pengaduan Pengembang jalan Tol dan Balai Jalan Nasional	Selesai
5.	Maret 2025	Pedagang Kaki Lima Kopi Keliling	Kota Jambi/ Jl. Jend. A. Yani Telanaipura	6 PKL	Pelanggar yang ditemui Petugas	Selesai
6.	09/07/2025	Penertiban Asset Pemerintah Provinsi Jambi	BPBD Provinsi Jambi	2 Lokasi	Pelanggar diberi surat peringatan	Selesai
7.	23/07/2025	Penertiban Pedagang Kaki Lima (Kopi Keliling)	Jl. Jend. A. Yani Telanaipura dan Jl. Soemantri Brojonegoro	2 Lokasi	Pelanggar diberi surat peringatan	Selesai

Jambi, Januari 2026
KEPALA SATUAN,

RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19661229 198512 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Gedung Kajang Lako Eks. Arena MTQ
RT. 01 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Kode Pos 36139

DATA JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT UNJUK RASA TERHADAP GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DISELESAIKAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

No	Hari / Tanggal	Waktu	Lokasi	Organisasi	Tuntutan	Pemecahan Masalah	Instansi terkait	Ket
1.	Senin 06/01/2025	Jam 10.30 s.d selesai	Kantor Gubernur dan DPRD Prov. Jambi	Perkumpulan Akomodasi Rakyat Miskin	- Menyikapi dugaan korupsi alat paraga pada Disdik - Dugaan kasus korupsi DAK 2022 di SMA 2 Tanjung Jabung Barat	Tidak ada tindak lanjut dan masa berlanjut Ke Kejati Jambi	Diterima oleh: Pihak Kepolisian, Pol PP Provinsi Jambi dan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	Aman dan terkendali
2	Senin 08/01/2025	Jam 10.30 s.d selesai	Kantor DPRD Prov. Jambi	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jambi di Kantor DPRD Provinsi Jambi	Pernyataan ketidak sesuaian tentang : - Pembanguna Islamic Center - Pos pemantauan Batu Bara	- Akan memantau penggunaan dana anggaran Tahun 2024 yang sedang dalam proses evaluasi. - Mengenai pos pemantauan Batu Bara akan dilaporkan kepimpinan	Diterima oleh : Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi	Aman dan terkendali
3	Senin 13/01/2025	Jam 10.30 s.d selesai	Kantor Gubernur Jambi	Pegawai Honorar (Guru Honorar) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	- Meminta kejelasan pormasi untuk Pegawai honorar R2 dan R3 - Meminta kejelasan mengenai pembayaran honor	- menunggu keputusan Menpan - Akan di sesuaikan dengan APBD tentang pembayaran honor	Diterima oleh : - Sekretaris Daerah Provinsi Jambi - Asisten I Setda Provinsi Jambi - Kepala BKD Provinsi Jambi	Aman dan terkendali

No	Hari / Tanggal	Waktu	Lokasi	Organisasi	Tuntutan	PemecahanMasalah	Instansi terkait	Ket
4	Selasa 14/01/2025	Jam 08.00 s/d selesai	Kantor Gubernur dan DPRD Prov. Jambi	Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Jambi	Aksi menuju Jambi mantab jilid 2 HMI Cabang Jambi Kembali mempertanyakan ketidak sesuaian perencanaan dan realita	- Menunggu keputusan Menpan - Akan di sesuaikan dengan APBD tentang pembayaran honor	Diterima oleh : - Asisten 1 Setda Provinsi i Jambi	Aman dan terkendali
5.	Kamis 16/01/2025	Jam 10.30 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi	Aliansi Tegakan Keadilan Provinsi Jambi	- Meminta kejelasan tentang masalah pertanian lahan dan pekerja - Meminta Gubernur Jambi mem berhentikan Kepala Dinas TPHP	Melakukan evaluasi , melanjutkan untuk bertemu Gubernur Jambi, dan menunggu perkembangan selanjutnya	Diterima oleh: Plh Asisten III Setda Provinsi Jambi	Aman dan terkendali
6.	Jum'at 17/01/2025	Jam 07.30 s/d selesai	Kantor Gubernur dan DPRD Prov. Jambi	PMII	- Copot Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi - Meminta DPRD Prov. Jambi menolak penambahan anggaran proyek multiyear - Usut pembongkaran proyek tango rajo - Mendesak DPRD menyelesaikan kunflik agrarian di Provinsi Jambi	Akan ditindaklanjuti dan tidak ada penambahan dana pada proyek multiyear	Diterima oleh: Ketua DPRD Provinsi Jambi	Aman dan terkendali
7	Kamis 30/01/2025	Jam 11.20 s/d selesai	Kantor Gubernur dan DPRD Prov. Jambi	HMI	- Meminta DPRD Jambi melaksanakan tugas perencanaan Multiyears - Mendesak Gubernur Jambi untuk membuat regulasi tentang angkutan batubara - Mempertanyakan kejelasan dan status pembangunan jalur khusus angkutan batubara - Menolak stockpile batubara yang ada di sekitaran candi muaro jambi	Akan ditindak lanjuti dan untuk sementara angkutan batu bara di sungai ditutup	Diterimaoleh: - Asisten 1 Setda Provinsi Jambi - Kasubbag Humas DPRD Provinsi Jambi	Aman dan terkendali

No	Hari / Tanggal	Waktu	Lokasi	Organisasi	Tuntutan	PemecahanMasalah	Instansi terkait	Ket
8.	Senin 03/02/2025	Jam 10.30 s/d selesai	Kantor Gubernur dan DPRD Prov. Jambi	Aliansi Mahasiswa	Polemik pembangunan multiyear dan angkutan batu bara di Provisi Jambi	Para pengunjung rasa tidak jadi datang untuk berorasi	-	Aman dan terkendali
9.	Rabu 05/02/2025	Jam 09.30 s/d selesai Dan 10.30 s/d 13.40 Wib	Kantor Gubernur Dan DPRD Provinsi Jambi	Aliansi Mahasiswa Bersuaka Dan HML Korkom Unbari	- Menolak hasil lelang seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di Sarolangun - Meminta Gubernur membatalkan rekomendasi izin pelantikan hasil lelang tersebut - Meminta gubernur membatalkan surat penunjukan Pj. Sekretariat Daerah Sarolangun - Evaluasi Kinerja Gubernur Jambi khususnya yaitu jalur batubara. Jalur Darat maupun air dari mandi angin Sarolangun sampai Pelabuhan kemang sekernan	- Akan di Proses sesuai Undang-undang yang berlaku - Akan disampaikan kepada Bapak Guberunur - Pembangunan jalur khusus batubara dilimpahkan ke 3 Perusahaan Swasta yaitu 40 perusahaan Pemegang IUP dan akan didorong oleh Pem prov yang akan diharapkan akan selesai pada akhir 2025 - Pemprov akan membuat perda untuk mengatur permasalahan jalur batubara tersebut	-	Aman dan terkendali
10.	Kamis 06/02/2025	Jam 09.30 s/d selesai Dan 10.30 s/d 13.40 Wib	Kantor Gubernur Jambi	Aliansi Mahasiswa Jambi dan LSM Formafek	- Jalan Truk Batubara jalan darat segera diselesaikan - Pembangunan Gedung olahraga yang belum selesai dikerjakan akan diserahkan dengan muktiyear 2025 - Pembangunan Gedung Abdul Rahman Sayuti di arena yang belum selesai - Dengan intervensi service di kota jambi kepada 193 peserta SNBP yaitu di SMK N 1 Kota Jambi yang menyebabkan 153 siswa gagal seleksi Nasional GNPB	Demontrasi membubarkan diri dan akan Kembali lagi dengan masa yang lebih besar Akan ditindaklanjuti dan akan disampaikan ke Gubernur Jambi	Polri dan Kasat Sabara Polresta Jambi Asisten 1	Aman dan terkendali

No	Hari / Tanggal	Waktu	Lokasi	Organisasi	Tuntutan	PemecahanMasalah	Instansi terkait	Ket
11.	Rabu 12/02/2025	Jam 12.00 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi	Federasi Serikat Buruh Jurnalis Provinsi Jambi	- Dugaan Intervensi Service di Kota Jambi Kepada 153 peserta SNBP yaitu di SMK Negeri 1 Kota Jambi yang menyebabkan 153 Siswa gagal selesai Nasional SNBP karena diduga pihak sekolah yang terlalu banyak bermain Tiktok sehingga para Guru dan termasuk Kepala Sekolah menjadi tidak focus pada system pendidikan	-	-	-
12.	Kamis 13/02/2025	Jam 10.00 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi	Aliansi Mahasiswa Jambi	- Masalah Jalur Batubara	Para pendemo tidak mau diwakili dengan Asisten atau yang lain Demonstrasi hanya mau ketemu Gubernur Jambi	Polri dan Satpol pp provinsi jambi	-
13	Jum'at 14/02/2025	Jam 09.00 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi	Aliansi Kesatuan Aksi Rakyat anti Korupsi Jambi	-	-	-	-
14.	Selasa 18/02/2025	Jam 15.00 s/d selesai	Kantor Gubernur Dan DPRD Provinsi Jambi	Gerakan Simpang BI Memanggil	Tolak Kebijakan efisiensi Anggaran di Bidang			Aman dan terkendali
15.	Selasa 24/02/2025	Jam 15.00 s/d selesai	Kantor Gubernur Dan DPRD Provinsi Jambi	Kelompok Tani Imam Hasan	- Menolak perpanjangan HGU PT. Das - Transparasi public pemerintah Daerah Tanaha Uhayat Desa Badang - Stop Kriminalitas Petani dan Aktifis - Bila semuna tuntutan tidak di kabulkan kami akan menginap dan didirikan tenda	Demonya akan dilanjutkan tanggal 25 Februari 2025		Aman dan terkendali

No	Hari / Tanggal	Waktu	Lokasi	Organisasi	Tuntutan	PemecahanMasalah	Instansi terkait	Ket
16.	Selasa 25/02/2025	Jam 09.00 s/d selesai	Kantor Gubernur Dan DPRD Provinsi Jambi	Kelompok Tani Imam Hasan	- Menolak perpanjangan HGU PT. Das - Transparasi public pemerintah Daerah Tanaha Uhayat Desa Badang - Stop Kriminalitas Petani dan Aktifis - Bila semuna tuntutan tidak di kabulkan kami akan menginap dan dirikan tenda	Bertindak sesuai peraturan yang berlaku	Asisten 1	Aman dan terkendali
17.	Selasa 26/02/2025	Jam 11.00 s/d selesai	DPRD Provinsi Jambi	Gabungan Aktifis Provinsi Jambi	- Illegal drilling/ pengolahan minyak di hutan senami di Kabupaten Batanghari meminta aparat menutup kegiatan	Akan disampaikan keanggota dewan	Sekretariat DPRD Provinsi Jambi	Aman dan terkendali
18.	Kamis 06/02/2025	Jam 10.45 s/d selesai	Kantor Gubernur	IMW Indonesia/ Aliansi Pro Keadilan	- Tutup Permanen illegal Drilling Senam	-	-	Aman dan terkendali
19.	Jumat 11/02/2025	Jam 10.00 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi	Ikatan Masyarakat Peduli Lingkungan Kota Jambi	- sehubungan dengan bencana alam (banjir) diseputaran Jamtos dan JBC dikarnakan lahan parkir sehingga resapan air tidak ada mengakibatkan masyarakat resah dan dirugikan, maka Al Haris selaku Gubernur Jambi 2 Periode dinyatakan gagal maka dengan itu akan melaksanakan aksi damai.	Tidak ada	-	Aman dan terkendali
20.	Senin 14/04/2025	Jam 10.30 s/d selesai	Kantor DPRD Prov. Jambi	Aliansi bongkar illegal Drilling	- menutup seluruh aktivitas illegal drilling - Pernyataan ketidak sesuaian tentang : - Pembanguna Islamic Center - Pos pemantauan Batu Bara	- Akan memantau penggunaan dana anggaranTahun 2024 yang sedangdalam proses evaluasi. - Mengenai pos pemantauan Batu Bara akan dilaporkan kepimpinan	Diterima oleh : Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi	Aman dan terkendali

No	Hari / Tanggal	Waktu	Lokasi	Organisasi	Tuntutan	Pemecahan Masalah	Instansi terkait	Ket
21.	Selasa 15/04/2025	Jam 09.00 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi dan DPRD Provinsi Jambi	TEKAP, KORPS ABHIDAH ADHIRAJASA	- mengenai revisi undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan	-	Diterima oleh : - Sekretaris DPRD Provinsi Jambi - Asisten I Arif Munandar	Aman dan terkendali
22.	Selasa 22/04/2025	Jam 08.00 s/d selesai	Kantor Gubernur dan DPRD Prov. Jambi	Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Jambi	Aksi menuju Jambi mantab jilid 2 HMI Cabang Jambi Kembali mempertanyakan ketidak sesuaian perencanaan dan realita	- Menunggu keputusan Menpan - Akan di sesuaikan dengan APBD tentang pembayaran honor	Diterima oleh : - Asisten 1 Setda Provinsi Jambi	Aman dan terkendali
23.	Jumat 29/04/2025	Jam 10.00 s/d selesai	Rumah Dinas Gubernur Jambi	DEMA, Sim pang BI Memanggil	Isu-isu yang terjadi di Provinsi Jambi	Tidak ada	-	Aman dan terkendali
24.	Senin 30/04/2025	Jam 10.30 s/d selesai	Kantor DPRD Prov. Jambi	Aliansi bongkar illegal Drilling	- menutup seluruh aktivitas illegal drilling - Pernyataan ketidak sesuaian tentang : - Pembanguna Islamic Center - Pos pemantauan Batu Bara	- Akan memantau penggunaan dana anggaran Tahun 2024 yang sedang dalam proses evaluasi. - Mengenai pos pemantauan Batu Bara akan dilaporkan kepimpinan	Diterima oleh : Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi	Aman dan terkendali

No	Hari / Tanggal	Waktu	Lokasi	Organisasi	Tuntutan	Pemecahan Masalah	Instansi terkait	Ket
25.	Kamis 08/05/2025	Jam 10.00 s/d selesai	Kantor DPRD Provinsi Jambi dan Kantor Gubernur	Aliansi Jambi Melawan	Untuk menanyakan kelanjutan dalam aksi unjuk rasa pada tanggal 23 April 2025 Kemarin	-	Diterima oleh : Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Muhammad Nasir, SE (Anggota Dewan Komisi I DPRD Provinsi Jambi)	Aman dan terkendali
26.	Senin 19/05/2025	Jam 08.00 s/d selesai	Kantor DPRD Provinsi Jambi dan Kantor Gubernur	Aksi Demonstrasi Damai Honorer Provinsi Jambi	- Demonstrasi serius dalam menuntaskan permasalahan Honorer Provinsi Jambi - Mngusulkan P3K Paruh Waktu Percepatan Pengangkatan	-	-	-
27.	Selasa 20/05/2025	Jam 08.00 s/d selesai	Kantor DPRD Provinsi Jambi dan Kantor Gubernur		- Serius dalam menuntaskan permasalahan Honorer sesuai dengan amanat UU NO 20 TH 2023 - Pengusulan PPPK paruh waktu percepatan pengangkatan tenaga paruh waktu, dan - Disepakati DPRD Provinsi Jambi dan pemerintah Provinsi Jambi sepakat memperjuangkan Gaji sesuai standar UMP Provinsi Jambi/ kenaikan Rp1.1.000.000,- pada saat status Honorer menjadi PPPK paruh waktu - DPRD Provinsi Jambi akan mengagendakan pertemuan dengan gubernur jambi bersama honorer Provinsi Jambi pada bulan Mei 2025 - Tidak ada intimidasi terhadap para honorer yang hadir memperjuangkan hak kesejahteraan pada hari ini tanggal 20 Mei 2025	-	Diterima oleh : Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Muhammad Nasir, SE (Anggota Dewan Komisi I dan IV DPRD Provinsi Jambi)	Aman dan terkendali

No	Hari / Tanggal	Waktu	Lokasi	Organisasi	Tuntutan	Pemecahan Masalah	Instansi terkait	Ket
28.	Senin 02/06/2025	Jam 10.00 s/d selesai	Kantor DPRD Provinsi Jambi dan Kantor Gubernur	Aliansi Masyarakat anti Korupsi (AMAK), Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK), Koalisi Aktivis peduli Hukum Jambi (KAPHJ)	- (aliansi masyarakat anti korupsi) jbc dan daerah aliensi sungai - (aliansi masyarakat untuk keadilan) dugaan pekerjaan piktif dan penyimpangan - (koalisi aktivis peduli hukum jambi) mengenai dinas PU provinsi Jambi	-	-	-
29.	Selasa 03/06/2025	Jam 10.00 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi	Aliansi Masyarakat Untuk keadilan	Dugaan piktif Dana 5,2 milyar di Kabupaten Muaro Jambi meminta Gubernur Jambi Memanggil saudara Kadis PPHB. evaluasi dan copot sementara tentang program sapi, meminta pimpinan Gubernur Jambi menaggil PPTK, PPK	-	Diterima oleh: Arif Munandar (Asisten I)	Aman dan terkendali
30.	Rabu 18/062025	Jam 11.00 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi	Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Daerah Jambi	- Menindaklanjuti atas laporan adanya dugaan indikasi Korupsi transparansi anggaran pasilitas yang tidak sesuai anggaran terkait Islamic center - Tata Kelola Proyrk yang tidak prepesional/ Anggaran - Meminta Kontraktor PUPR mengklarifikasi/ bertanggung jawab - Meminta Komisi III DPRD Provinsi Jambijujur tentang pembangunan Islamic center	-	Diterima oleh: Arif Munandar (Asisten I)	Aman dan terkendali
31.	Rabu 23/06/2025	Jam 11.00 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi	BEM Fakultas Syariah STS Jambi	- meminta transparasi terkait Efisiensi Anggaran Provinsi Jambi - Menuntut penyelesaian Isu Lingkungan Hidup - menuntut penyelesaian jalan alternatic batubara	-	Diterima oleh: Arif Munandar (Asisten I)	-

No	Hari / Tanggal	Waktu	Lokasi	Organisasi	Tuntutan	Pemecahan Masalah	Instansi terkait	Ket
32.	Kamis 26/06/2025	Jam 12.30 s/d selesai	Kantor DPRD Provinsi Jambi dan Kantor Gubernur	BEM Fakultas Syariah STS Jambi	- meminta transparansi terkait Efisiensi Anggaran Provinsi Jambi - Menuntut penyelesaian Isu Lingkungan Hidup - menuntut penyelesaian jalan alternatic batubara	-	-	-
33.	Jum'at 04/07/2025	Jam 07.30 s/d selesai	Rumah Dinas Gubernur Jambi	Audiensi Mahasiswa UIN di Rumah Dinas Gubernur Jambi	-	-	-	Demo tidak jadi/batal
34.	Selasa 08/07/2025	Jam 07.30 s/d selesai	Rumah Dinas Gubernur Jambi	Koalisi Aktivis Peduli Hukum Jambi	- Meminta Kadis PU Provinsi Jambi merekomendasikan pemberhentian kepihak pegawai PU inisial "RS" Karna belum dibutuhkan - Meminta Gubernur Jambi merekomendasikan pemberhentian segera sebagai pegawai PU	-	-	-
35.	Rabu 09/07/2025	Jam 10.00 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi	Koalisi Aktivis Peduli Hukum Jambi	- Meminta Gubernur Jambi merekomendasikan pemberhentian segera pegawai Dinas PUPR Provinisi Jambi berinisial (RS)	-	-	-
36.	Selasa 15/07/2025	Jam 09.00 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi	Pemuda Anti Korupsi Jambi	- Kawal kasus dugaan korupsi dana pembangunan Islamic center 150 m - Berhentikan Kadis PU	-	-	
37.	Senin 21/07/2025	Jam 10.00 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi	Komoditas Ojol/DPW Tkab Jambi	- Do'a bersama Ojol Jambi dalam menyikapi aksi 217 Kepung Istana serta meminta kepedulian pemerintah Provinsi Jambi terhadap Ojol Jambi	-	-	-

No	Hari / Tanggal	Waktu	Lokasi	Organisasi	Tuntutan	Pemecahan Masalah	Instansi terkait	Ket
38.	Senin 04/08/2025	Jam 08.00 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi dan DPRD provinsi Jambi	Aliansi Petani Jambi Menggugat	- Tegakkan undang-undang agraria No.33 dan 60 No 45 - Tegakkan keadilan tentnag sangketa lahan utama PT WKS dan kependudukan - Evakuasi selesaikan konflik agraria di Provinsi Jambi	Aspirasi Demonstrasi akan disampaikan kepada Gubernur Jambi	Diterima oleh : Arif Munandar (Asisten I), johansyah ketua komisi 5 DPRD Provinsi Jambi	Aman dan terkendali
39.	Senin 11/08/2025	Jam 09.30 s/d selesai	Rumah Dinas Gubernur Jambi	Kompej/ Himpunan Aspirasi Masyarakat	- Gagalkan pelantikan Bapak M. Sanusi diktua Koni	-	-	-
40	Jumat 29/08/2025	Jam 13.30 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi dan DPRD provinsi Jambi	Aliansi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa Jambi Melawan	- Stop Bayar Pajak - Bubarkan DPRD	-	-	Anarkis
41	Sabtu 30/08/2025	Jam 07.15 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi dan DPRD provinsi Jambi	Konsolidasi Akbar Indonesia Gelap Jambi Merayap	-	-	-	-
42	Minggu 31/08/2025	Jam 07.15 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi dan DPRD provinsi Jambi	Aliansi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa Jambi Melawan	-	-	-	-

No	Hari / Tanggal	Waktu	Lokasi	Organisasi	Tuntutan	Pemecahan Masalah	Instansi terkait	Ket
43.	Senin 01/09/2025	Jam 07.15 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi dan DPRD provinsi Jambi	Gerakan Masyarakat Jambi	-	-	-	-
44.	Selasa 02/09/2025	Jam 07.15 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi dan DPRD provinsi Jambi	Gerakan Masyarakat Jambi	-	-	-	-
45.	Rabu 03/09/2025	Jam 07.15 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi dan DPRD provinsi Jambi	Aliansi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa Jambi Melawan	-	-	-	-
46.	Kamis 04/09/2025	Jam 07.15 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi dan DPRD provinsi Jambi	Aliansi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa Jambi Melawan	-	-	-	-
47.	Jumat 05/09/2025	Jam 07.15 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi dan DPRD provinsi Jambi	Aliansi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa Jambi Melawan	-	-	-	-

No	Hari / Tanggal	Waktu	Lokasi	Organisasi	Tuntutan	Pemecahan Masalah	Instansi terkait	Ket
48.	Senin 12/09/2025	Jam 07.15 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi dan DPRD provinsi Jambi	Aksi Damai Panggung Rakyat Jambi Bersuara Forum Komunikasi Mahasiswa Jambi	- mengawal reformasi polri atau segala sesuatu yang telah terjadi (HAM, Affank) waktu lalu - - mengawal DPRD dan DPR-RIDapil Jambi untuk segera meninjaklanjuti Aspirasi Masyarakat	Demonstrasi melakukan orasi hanya diluar pagar kantor gubebernur Jambi	-	-
49.	Jumat 17/09/2025	Jam 07.15 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi dan DPRD provinsi Jambi	Aliansi Suara Rakyat Jambi	-	-	-	-
50.	Kamis 30/10/2025	Jam 13.00 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi dan DPRD provinsi Jambi	Mahasiswa Pemuda Peduli Jambi	- percepat bangunan jalur khusus batu bara - Optimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan tingkatkan Kapasitas sumber daya manusia daerah - wujudkan mandirian fiskal dan tata kelola daerah yang transparan - - meminta DPRD Prov. Jambi dan Gubernur Jambi mendesak KPK untuk menyelesaikan permasalahan Dugaan kasus suap pada Pemilihan Pimpinan DPD RI yang melibatkan beberapa anggota DDPD RI Dapil Jambi	Aspirasi Demonstrasi akan disampaikan kepada Gubernur Jambi	Diterima oleh : Pihak Kepolisian	-
51.	Jum'at 31/10/2025	Jam 08.30 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi dan DPRD provinsi Jambi	Gabungan Mahasiswa Jambi dan Pront Mahasiswa Pemuda Merangin Jambi	- Penijauan Proyek PBJ Strategis Provinsi Jambi - - Rapat Koordinasi dan Evaluasi MCSP 2025 peninjauan Proyek PBJ Strategis Provinsi Jambi	-	-	-

No	Hari / Tanggal	Waktu	Lokasi	Organisasi	Tuntutan	Pemecahan Masalah	Instansi terkait	Ket
52.	Kamis 6/11/2025	Jam 08.00 s/d selesai	Kantor Gubernur Jambi dan DPRD provinsi Jambi	Aliansi Aktifis Jambi Bergerak	- Bebaskan Aktifis petani jambi sdr Thawaf, aly yang diduga dikriminalisasi - Basmi, hancurkan para mafia hukum yang ada di Jambi - Tangkap para mafia hutan lindung yang dibuat jalan berkilo-kilo, untuk kepentingan dan keuntungan pribadi - Tangkap para mafia hutan lindung yang membuat hutan lindung yang menjadi kebun untuk kepentingan pribadi, dikerjakan menggunakan alat berat	Aspirasi Demonstrasi akan disampaikan kepada Gubernur Jambi	Diterima oleh : Pihak Kepolisian	-

Jambi, Januari 2026

KEPALA SATUAN,



RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.

Penyambung Lidah Rakyat
Dan Pembina Utama Madya

Np.19861229 198512 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Gedung Kajang Lako Eks. Arena MTQ
RT. 01 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Kode Pos 36139

DATA KESELURUHAN PERDA DAN PERKADA PRIORITAS YANG MEMUAT SANKSI YANG DITEGAKKAN

NO	PERDA DAN PERKADA PROVINSI JAMBI	KETERANGAN
1	2	3
Peraturan Daerah Provinsi Jambi		
1.	Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Masih Berlaku
2.	Perda Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	sda
3.	Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perda Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Usaha	sda
4.	Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	sda
5.	Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Bahan Adiktif Lainnya dan Perda Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Bahan Adiktif Lainnya	sda
6.	Perda Nomor 14 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	sda
7.	Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah	sda
NO	PERDA DAN PERKADA PROVINSI JAMBI	KETERANGAN
1	2	3
Peraturan Gubernur Jambi		
1.	Pergub Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	Masih berlaku

Jambi, Januari 2026

KEPALA SATUAN,

RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 19661229 198512 1 001





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Gedung Kajang Lako Eks. Arena MTQ
RT. 01 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Kode Pos 36139

DATA PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN

NO	PERDA DAN PERKADA PROVINSI JAMBI	KETERANGAN
1	2	3
Peraturan Daerah Provinsi Jambi		
1.	Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Ditegakkan
2.	Perda Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	sda
3.	Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perda Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Usaha	sda
4.	Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	sda
5.	Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Bahan Adiktif Lainnya dan Perda Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Bahan Adiktif Lainnya	sda
6.	Perda Nomor 14 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	sda
7.	Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah	sda
Peraturan Gubernur Jambi		
1	Pergub Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	Ditegakkan

Jambi, Januari 2026

KEPALA SATUAN,



RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 19661229 198512 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Gedung Kajang Lako Eks. Arena MTQ
RT. 01 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Kode Pos 36139

INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)
PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN
URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	ASPEK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	5	6	8	9
1	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Perda/Perkada Yang ditegakkan	$\frac{\text{Jmh Perda/Perkada memuat sanksi yg ditegakkan}}{\text{Jmh Keseluruhan Perda/Perkada yg memuat sanksi}} \times 100\%$ $\frac{8}{8} \times 100\%$	100 %	Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi.

Sumber : Bidang PUD Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi

Jambi, Januari 2026

KEPALA SATUAN,



RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 19661229 198512 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Gedung Kajang Lako Eks. Arena MTQ
RT. 01 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Kode Pos 36139

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

NO	ASPEK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	5	6	8	9
1	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada Yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jmh Penyelesaian Pelanggar Perda dan Perkada}}{\text{Jmh Keseluruhan Pelanggaran Perda dan Perkada}} \times 100\%$ $\frac{179}{179} \times 100 \%$	100 %	Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi.

Sumber : Bidang PUD Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi

Jambi, Januari 2026

KERALA SATUAN,



RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 19661229 198512 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Gedung Kajang Lako Eks. Arena MTQ
RT. 01 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Kode Pos 36139

RINCIAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA TAHUN 2025

No	Bulan	Aturan Yang ditegakkan	Jumlah Kegiatan					Temuan / hasil	Sanksi
			Pengawasan	Non Yustisi	Koordinasi	Sosialisasi	Pembinaan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Januari	Perda No. 11 Tahun 2012, Perda No. 6 Tahun 2018 dan Perda No. 14 Tahun 2019	5 Kali	3 Kali	5 kali	1 Kali	2 Kali	Petugas menemukan 7 (Tujuh) orang Pedagang yang membuka lapak di Kawasan Rumah Sakit Raden Mataher Jl. Letjen Suprpto Telanaipura di Kota Jambi	Teguran Lisan dan di Data
2	Februari	Perda No. 11 Tahun 2012, Perda No. 6 Tahun 2018 dan Perda No. 14 Tahun 2019	1 Kali	2 Kali	5 Kali	1 Kali	2 Kali	Petugas menemukan 19 (sembilan belas) Pelajar yang terjaring dalam Penertiban Pelajar SMA/SMK ,Petugas menemukan 11 Unit kendaraan Angkutan Armada Dam Truck terparkir dan Petugas menemukan 85 (Delapan puluh lima) Kendaraan Roda 2 dan 8 (Delapan) Kendaraan Roda 4 yang terparkir liar yang berada di depan parkir Beton RSUD Raden Mattaheer Jambi	Teguran Lisan dan di Data
3	Maret	Perda No. 11 Tahun 2012, Perda No. 6 Tahun 2018 dan Perda No. 14 Tahun 2019	1 Kali	1 Kali	3 Kali	2 Kali	2 Kali	Petugas tidak menemukan Pedagang membuka lapak di sepanjang jalan kawasan perkantoran Telanaipura dan Pengawasan di Kawasan Taman Tugu Juang serta Sipin ujung Jembatan Gentala Arasy di Kota Jambi	Teguran Lisan dan di Data
4	April	Perda No. 11 Tahun 2012, Perda No. 14 Tahun 2019, Perda No. 9 Tahun 2022	1 Kali	1 Kali	3 Kali	1 Kali	1 Kali	Petugas tidak menemukan Pedagang membuka lapak di sepanjang jalan kawasan perkantoran Telanaipura dan Pengawasan di Kawasan Taman Danau Sipin di Kota Jambi	Teguran Lisan dan di Data

No	Bulan	Aturan Yang ditegakkan	Jumlah Kegiatan					Temuan / hasil	Sanksi
			Pengawasan	Non Yustisi	Koordinasi	Sosialisasi	Pembinaan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Mei	Perda No. 11 Tahun 2012 dan Perda No. 14 Tahun 2019	1 Kali	2 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	Petugas tidak menemukan Pedagang membuka lapak di sepanjang jalan kawasan perkantoran Telanaipura dan Pengawasan di Kawasan Taman Danau Sipin di Kota Jambi dan Petugas menemukan Pelajar yang terjaring di beberapa titik lokasi Warung Internet (Warnet) dan Rental Play station (PS) berjumlah 15 orang Pelajar terdiri 11 Orang Pelajar SMA/SMK dan 4 Orang Pelajar SMP	Teguran Lisan dan di Data
6	Juni	Perda No. 14 Tahun 2019	1 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	-
7	Juli	Perda No. 11 Tahun 2012 dan Perda No. 14 Tahun 2019	1 Kali	2 Kali	5 Kali	1 Kali	1 Kali	Petugas menemukan 41 (empat puluh satu) Pedagang menggunakan gerobak Kopi keliling dan membuka lapak dagangannya di kawasan sepanjang Jalan depan A. Yani, Kantor RRI Telanaipura dan Eks. Arena MTQ, kegiatan terlaksana dengan lancar dan tertib	Teguran Lisan dan di Data
8	Agustus	Perda No. 11 Tahun 2012 dan Perda No. 14 Tahun 2019	2 Kali	1 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	Petugas menemukan 2 (dua) Pedagang menggunakan gerobak Kopi keliling dan membuka lapak dagangannya di kawasan sepanjang Jalan depan A. Yani, Kantor RRI Telanaipura dan menggunakan Mobil Box di depan Kantor PKK Provinsi Jambi, kegiatan terlaksana dengan lancar dan tertib	Teguran Lisan dan di Data
9	September	Perda No. 11 Tahun 2012 dan Perda No. 14 Tahun 2019	1 Kali	1 Kali	3 Kali	1 Kali	1 Kali	-	-

No	Bulan	Aturan Yang ditegakkan	Jumlah Kegiatan					Temuan / hasil	Sanksi
			Pengawasan	Non Yustisi	Koordinasi	Sosialisasi	Pembinaan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Oktober	Perda No. 14 Tahun 2019 dan Kep.Gub No 649/KEP.GUB/IT Prov-6/2022	1 Kali	2 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	Petugas menemukan 1 (satu) Pedagang menggunakan gerobak Kopi keliling dan membuka lapak dagangannya di kawasan sepanjang Jalan depan A. Yani, Kantor RRI Telanaipura, kegiatan terlaksana dengan lancar dan tertib	Teguran Lisan dan di Data
11	November	Perda No. 11 Tahun 2012, Permen Keu No. 192/PMK.0.10/2021, Pergub No. 97 Tahun 2024, Perda No. 5 Tahun 2017, Perda No. 2 Tahun 2019 dan Perda No. 14 Tahun 2019,	1 Kali	2 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	Petugas menemukan 1 (satu) Pedagang menggunakan gerobak Kopi keliling dan membuka lapak dagangannya di kawasan sepanjang Jalan depan A. Yani, Kantor RRI Telanaipura, kegiatan terlaksana dengan lancar dan tertib	Teguran Lisan dan di Data
12	Desember	Perda No. 14 Tahun 2019	1 Kali	1 Kali	4 Kali	1 Kali	1 Kali	-	-
Jumlah			17 Kali	20 Kali	37 Kali	13 Kali	13 Kali		



Januari 2026
KEPALA SATUAN,

RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 19661229 198512 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Gedung Kajang Lako Eks. Arena MTQ
RT. 01 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Kode Pos 36139

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

NO	ASPEK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	5	6	8	9
1	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	$\frac{\text{Jmh Personil Satpol PP berkualitas PPNS}}{\text{Jmh Personil Satpol PP}} \times 100\%$ $\frac{11}{154} \times 100\%$	7.14 %	Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi.

Sumber : Bidang Perundang-Undangan Daerah Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi

Jambi, Januari 2026



KEPALA SATUAN,

RAHMAD Hidayat, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 19661229 198512 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Gedung Kajang Lako Eks. Arena MTQ
RT. 01 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Kode Pos 36139

DATA PEJABAT PPNS SATPOL PP DAN DAMKAR PROVINSI JAMBI

NO	NAMA/NIP/GOL	NO SK PPNS	NO KTP	MASA BERLAKU	WILAYAH	UU YG DIKAWAL
1	2	3	4	5	6	7
1	Rahmat Irsan, S.STP, MH Nip.198501052003121001	AHU- 16.AH.09.01 Tahun 2022	002.059.1 6.22	05-08-2027	Provinsi Jambi	UU No. 5 Tahun 1990 Ttg Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem
2	Iwan Surahman, SH Nip.197005021990091001	AHU- 55.AH.09.02 Tahun 2014	002.031.5 5.14	30-06-2019	Provinsi Jambi	UU No. 23 Tahun 2014 Ttg Pemda
3	Dwi Endro. P, SH Nip.197206171992031003	AHU- 55.AH.09.02 Tahun 2014	002.033.5 5.14	30-06-2019	Provinsi Jambi	UU No. 23 Tahun 2014 Ttg Pemda
4	Akmal, SH Nip.197104051992031004	AHU- 55.AH.09.02 Tahun 2014	002.028.5 5.14	30-06-2019	Provinsi Jambi	UU No. 23 Tahun 2014 Ttg Pemda
5	Amrizal, SH Nip. 196910171991021003	AHU- 55.AH.09.02 Tahun 2014	002.027.5 5.14	30-06-2019	Provinsi Jambi	UU No. 23 Tahun 2014 Ttg Pemda
6	Ardiansyah Taputra, SE Nip. 197001271990101001	AHU- 55.AH.09.02 Tahun 2014	002.029.5 5.14	30-06-2019	Provinsi Jambi	UU No. 23 Tahun 2014 Ttg Pemda
7	Jamilludin, SE Nip.196610171991081001	C.37 HN 05.01 Tahun 2002		10-03-2006	Provinsi Jambi	UU No. 23 Tahun 2014 Ttg Pemda
8	Faisal Hamid, SE Nip.198309302009011009	AHU- 55.AH.09.02 Tahun 2014	002.004.3 5.14	27-08-2019	Provinsi Jambi	UU No. 23 Tahun 2014 Ttg Pemda
9	Zuhdi, SIP Nip.198602092012121001	AHU- 42.AH.09.01 TAHUN 2016	002.011.4 2.16	01-09-2021	Provinsi Jambi	UU No. 23 Tahun 2014 Ttg Pemda
10	Reza Maulana, SE Nip. 197609072008031001	AHU-52 AH.09.01 TH.2014	002.019.5 2.14	2009	Provinsi Jambi	UU No. 23 Tahun 2014 Ttg Pemda
11	Agus Jali, SE Nip.198308162008011001	AHU- 26.AH.09.01 TAHUN 2020	002.018.2 6.20	01-12-2025	Provinsi Jambi	UU No. 23 Tahun 2014 Ttg Pemda



Jambi, Januari 2026

KEPALA SATUAN,

RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 19661229 198512 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN

Jalan Jenderal A. Yani No. 10 Telanaipura Jambi
Telp (0741) 63391 Fax (0741) 63391

REKAPITULASI DATA SATLINMAS SE-PROVINSI JAMBI

NO	SATLINMAS SE-PROVINSI JAMBI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Satlinmas Desa / Kelurahan	14.643	11 Kab/Kota

NO	KAB / KOTA	DESA / KELURAHAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kab. Tanjung Jabung Barat	134	2.106	Sudah Dikukuhkan
2	Kab. Tanjung Jabung Timur	93	1.595	Sudah Dikukuhkan
3	Kab. Batanghari	124	970	Sudah Dikukuhkan
4.	Kab. Merangin	215	1.455	Sudah Dikukuhkan
5.	Kota Jambi	62	1.816	Sudah Dikukuhkan
6.	Kota Sungai Penuh	69	590	Belum Dikukuhkan
7.	Kab. Muaro Jambi	155	352	Belum Dikukuhkan
8.	Kab. Sarolangun	158	554	Belum Dikukuhkan
9.	Kab. Tebo	112	2.253	Belum Dikukuhkan
10.	Kab. Bungo	153	1.044	Belum Dikukuhkan
11.	Kab. Kerinci	287	1.908	Belum Dikukuhkan
Jumlah		1562	14.643	Dikukuhkan 7.942 orang

Sumber Bidang Linmas Satpol PP Provinsi Jambi



Jambi, Januari 2026

KEPALA SATUAN,

RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 19661229 198512 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Gedung Kajang Lako Eks. Arena MTQ
RT. 01 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Kode Pos 36139

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

NO	ASPEK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	5	6	8	9
1	KESIAPSIAGAAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN DAERAH RAWAN KEBAKARAN	Persentase Data Wilayah Manajemen Kebakaran	$\frac{\text{Jlh Response Time Rate Kejadian Kebakaran}}{\text{Jlh Kejadian Kebakaran dalam wilayah WMK}} \times 100\%$ $\frac{416}{597} \times 100\%$	69.68 %	Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi.

Sumber : Bidang Trantibum Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi



Jambi, Januari 2026
KEPALA SATUAN,

RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19661229 198512 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Gedung Kajang Lako Eks. Arena MTQ
RT. 01 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Kode Pos 36139

DATA WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN KAB/KOTA SE-PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

NO	Kab / Kota	Triwulan								Jlh Rata – rata / Tahun (%)
		I		II		III		IV		
		Jumlah Kasus kebakaran di WMK	Jumlah Response Time Rate	Jumlah Kasus kebakaran di WMK	Jumlah Response Time Rate	Jumlah Kasus kebakaran di WMK	Jumlah Response Time Rate	Jumlah Kasus kebakaran di WMK	Jumlah Response Time Rate	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (3+5+7+9) / (4+6+8+10) x 100 %
1	Kota Jambi	16	1	24	17	67	62	39	1	55.48
2	Muaro Jambi	12	10	15	14	25	25	8	7	93.33
3	Tanjab Barat	7	7	9	5	11	11	4	4	87.10
4	Tanjab Timur	4	0	9	0	18	1	0	0	3.23
5	Batanghari	11	6	8	6	17	8	8	4	54.55
6	Kab. Tebo	15	11	25	15	35	31	18	13	75.27
7	Kab.Bungo	10	9	12	12	41	41	19	19	98.78
8	Sarolangun	4	0	5	5	14	14	3	0	73.08
9	Merangin	8	8	6	6	4	4	14	12	93.75
10	Sei.Penuh	3	0	5	0	4	0	13	0	0
11	Kerinci	0	0	9	9	9	9	9	9	100
Jumlah		90	52	127	89	245	206	135	69	69.68

Sumber Bidang Dalkar Satpol PP Provinsi Jambi Tahun 2025



Jambi, Januari 2026

KEPALA SATUAN,

RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 19661229 198512 1 001